



Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM

Kepulauan Riau



Jalan R.H Kelana, Orchard Park Boulevard
K-7 Kel.Belian, Kec.Batam Kota
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau



+62 778 4161030 / +62 87710323030



badiklat.kepri@kemenkumham.go.id
badiklatkumham.kepri@gmail.com



<http://badiklat-kepri.kemenkumham.go.id>

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta tindak lanjut atas restrukturisasi program dan kegiatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan wujud petanggung jawaban atas pelaksanaan tugas, sesuai dengan visi dan misi yang dibebankan kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2021, maka Disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) .

LAKIP ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, serta sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

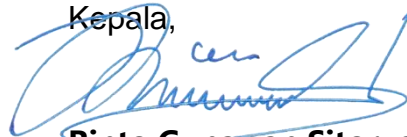
LAKIP Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014.

LAKIP Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari Pencapaian sasaran dan kegiatan.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan segenap *stakeholder's* yang berkepentingan dapat memperoleh data dan informasi yang bermanfaat yang dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya.

Batam, 24 Januari 2022

Kepala,



Rinto Gunawan Sitorus

NIP. 198208292008011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi, Misi dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	4
D. Struktur Organisasi	5
E. Sumber Daya Manusia	6
F. Peran Strategis Badiklat Hukum dan HAM Kepri	8
G. Sitematika Laporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis (Renstra)	11
B. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja	19
B. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama	20
C. Kendala Atau Hambatan	28
D. Capaian Realisasi Anggaran Badiklat Hukum dan HAM Kepri Tahun 2021	29
E. Analisa Efisiensi	33
BAB IV PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Rencana Tindak Lanjut	37
LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Pegawai.....	7
Tabel 2. Sasaran Strategis kementerian Hukum dan HAM 2020-2024	11
Tabel 3. Sasaran Strategis BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024.....	14
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Badiklat Hukum dan HAM Kepri Tahun 2021	16
Tabel 5. Indikator Capaian Output Badiklat Hukum dan HAM Kepri 2021	17
Tabel 6. Hasil Kinerja Capaian Output Badiklat Hukum dan HAM Kepri	19
Tabel 7. Hasil Capaian Perjanjian Kinerja Badiklat Hukum dan HAM Kepri	20
Tabel 8. Perbandingan Jumlah peserta, Tingkat Kelulusan, dan Jenis Pelatihan yang diselenggarakan ditahun 2020 dan 2021	23
Tabel 9. Daftar Pelatihan yang Diselenggarakan di Tahun 2021	24
Tabel 10. Hasil Evaluasi Pasca Diklat Indikator Peningkatan Skill, Knowledge dan Attitude di Tahun 2021	26
Tabel 11. Hasil Evaluasi Pasca Diklat Indikator Penempatan Sesuai Kompetensinya di Tahun 2021	27
Tabel 12. Penyerapan Anggaran Tahun 2021	29
Tabel 13. Daftar Revisi Anggaran di Tahun 2021	30
Tabel 14. Perbandingan Penyerapan Anggaran Antara Tahun 2020 dan 2021	32
Tabel 15. Capaian Kinerja Program Kegiatan Badiklat Hukum dan HAM Kepri.....	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk mamastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka pembangunan kualitas sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dibidang hukum dan HAM berbasis teknologi informasi (e-gov PASTI Nyata), Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi, pelatihan baik klasikal maupun e-learning dan penilaian kompetensi bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan para Aparatur Penegak Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Administrasi.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

B. Visi, Misi dan Tujuan

Visi dan Misi Kementerian atau Lembaga berpedoman kepada Visi dan Misi Presiden terpilih dalam RPJMN. Visi yang terdapat di dalam rencana strategis Kementerian atau Lembaga merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian atau Lembaga tersebut pada akhir periode perencanaan. Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi Kementerian atau Lembaga yang berupa rumusan umum upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Sementara itu, tujuan didefinisikan sebagai penjabaran dari Visi yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks organisasi BPSDM Hukum dan HAM dan Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Visi dan Misi yang dituangkan dalam laporan ini akan identik dan mengikuti Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan penetapan visi Kementerian tersebut, BPSDM Hukum dan HAM melalui Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan menjalankan peran serta menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam upaya pencapaian visi Kementerian tersebut, khususnya dalam berbagai aspek penyiapan dan pengembangan SDM aparatur.

BPSDM Hukum dan HAM melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau mempunyai peranan strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. Yakni “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

C. Tugas dan Fungsi

Amanah Menteri Hukum dan HAM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM telah dengan tegas menyatakan bahwa Badiklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dengan mengacu kepada tugas dan fungsi yang diamanahkan tersebut, serta dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024, maka sangat terlihat jelas indikasi bahwa Balai Diklat Hukum dan HAM memiliki peranan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia aparatur bidang Hukum dan HAM sesuai dengan kualitas, kompetensi dan kapabilitas yang diharapkan untuk menjalankan upaya pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badiklat Hukum dan HAM terdiri dari beberapa fungsi yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Seksi Program dan Evaluasi

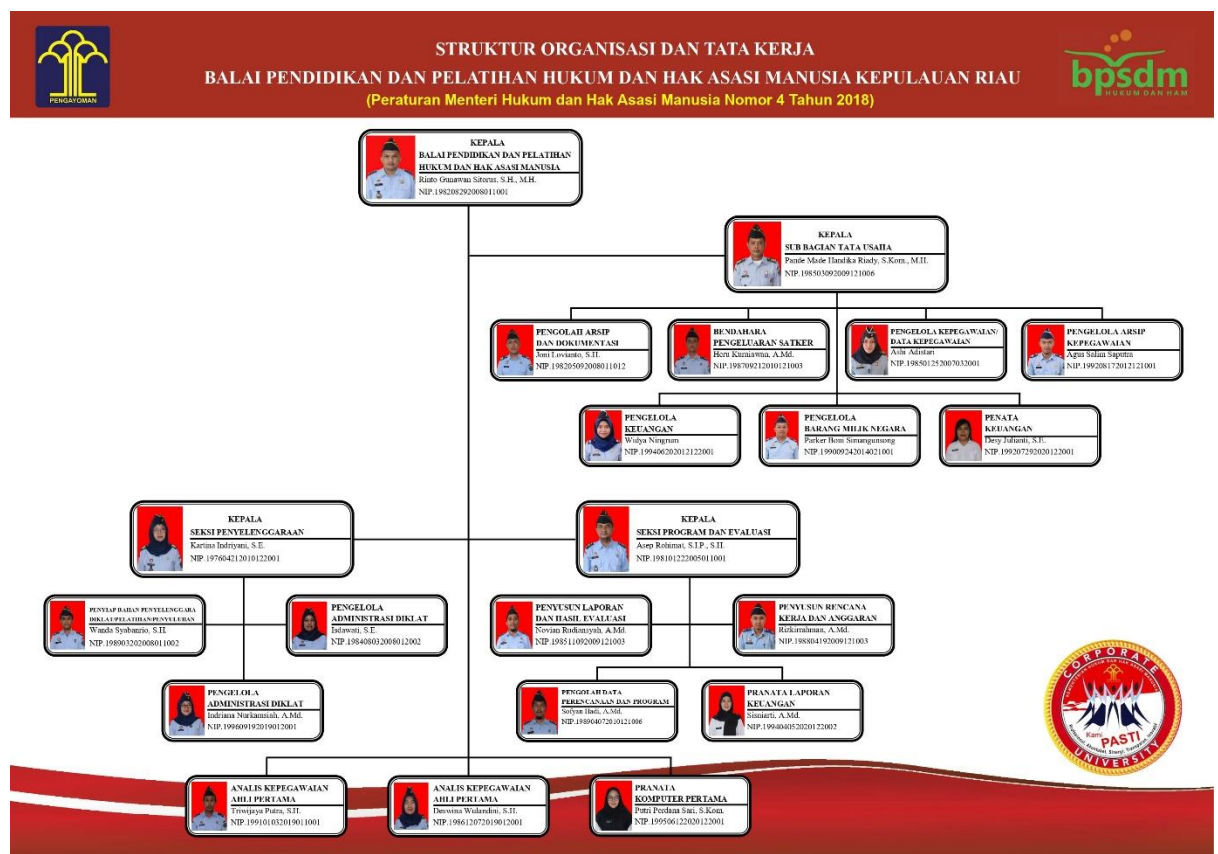
Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di

bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan diklat di wilayah.

Seksi Penyelenggaraan

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Gambar 1. Struktur Organisasi Badiklat Hukum dan HAM Kepri



E. Sumber Daya Manusia

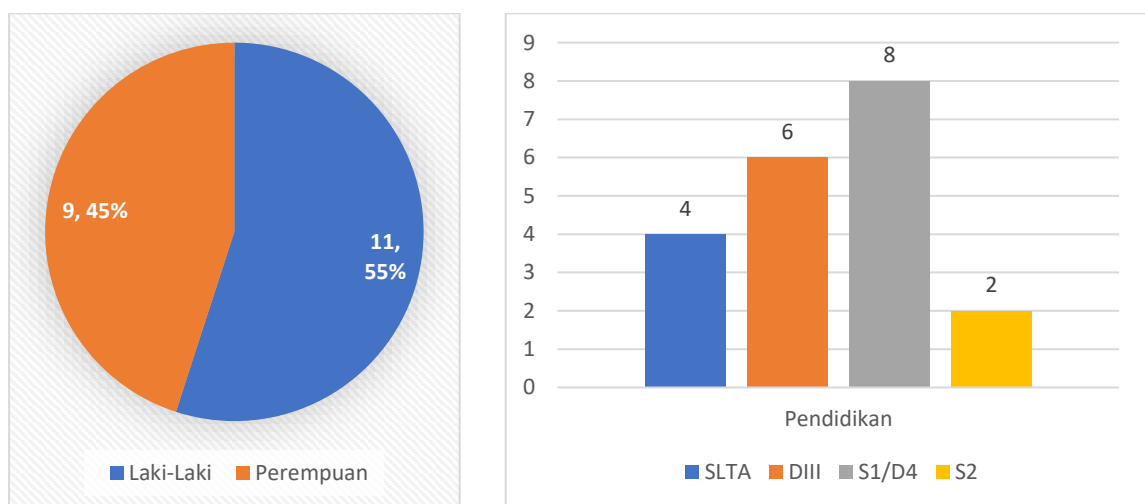
Badiklat Hukum dan HAM Kepri dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengembangan SDM didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan berbagai latar belakang dan Pendidikan yang berbeda. Berikut Daftar nama-nama pegawai Badiklat Hukum dan HAM Kepri:

Tabel 1. Daftar Pegawai

NAMA	MASA KERJA (THN-BLN)	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	USIA (THN-BLN)
Rinto Gunawan Sitorus, S.H. 19820829 200801 1 001	14-0	III/d	Kepala Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	Magister Hukum S2 / Magister Hukum	39-5
Pande Made Handika Riady, S.Kom., M.H. 19850309 200912 1 006	12-1	III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	Magister Hukum S2 / Magister Hukum	36-10
Kartina Indriyani, S.E. 19760421 201012 2 001	11-1	III/c	Kepal Seksi Penyelenggaraan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	S1 Ekonomi	45-9
Wanda Syabanrio, S.H. 19890320 200801 1 002	14-0	III/b	Penyiap Bahan Penyelenggara Diklat/Pelatihan/Penyuluhan	SLTA	32-10
Joni Lovianto, S.H. 19820509 200801 1 012	14-0	III/b	Pengolah Arsip Dan Dokumentasi	Hukum S1 / Hukum	39-8
Isdawati, S.E. 19840803 200801 2 002	14-0	III/b	Analisis Kebutuhan Dan Manfaat Pelatihan	S1 / Ekonomi Manajemen	37-5
Novian Rudiansyah, A.Md. 19851109 200912 1 003	12-1	III/a	Penyusun Laporan Dan Hasil Evaluasi	DIII Teknik Informatika	36-2
Rizkirrahman, A.Md. 19880419 200912 1 003	12-1	III/a	Penyusun Rencana Kerja Dan Anggaran	DIII Teknik Informatika	33-9
Sofyan Hadi, A.Md. 19890407 201012 1 006	11-1	III/a	Pengolah Data Perencanaan Dan Program	DIII Teknik Informatika	32-9
Heru Kurniawan, A.Md. 19870921 201012 1 003	11-1	III/a	Bendahara Pengeluaran Satker	DIII Teknik Informatika	34-4
Deswina Wulandini, S.H. 19861207 201901 2 001	3-0	III/a	Analisis Kepegawaian Pertama	Hukum S1 / Hukum	35-1
Triwijaya Putra, S.H. 19910103 201901 1 001	3-0	III/a	Analisis Kepegawaian Pertama	Hukum S1 / Hukum	31-0
Parker Boni Simangunsong, S.Pd 19900924 201402 1 001	7-11	III/a	Pengelola Barang Milik Negara	S1 / Pendidikan	31-4
Ashi Adistari 19850125 200703 2 001	14-10	II/d	Pengelola Kepegawaian/Data Kepegawaian	SLTA Bahasa	37-0
Indriana Nurkamsiah, A.Md.	3-0	II/c	Pengelola Administrasi Diklat	DIII Akuntansi	25-4

NAMA	MASA KERJA (THN-BLN)	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	USIA (THN-BLN)
19960919 201901 2 001					
Widya Ningrum 19940620 201212 2 001	9-1	II/c	Pengelola Keuangan	SLTA IPA	27-7
Agus Salim Saputra 19920817 201212 1 001	9-1	II/c	Pengelola Arsip Kepegawaian	SLTA Rekayasa Perangkat Lunak	29-5
Desy Julianti, S.E. 19920729 202012 2 001	1-1	III/a	Penata Keuangan	S1	29-6
Putri Perdana Sari, S.Kom. 19950612 202012 2 001	1-1	III/a	Pranata Komputer Pertama	S1	26-7
Sisniarti, A.md 19940405 202012 2 002	1-1	II/c	Pranata Laporan Keuangan	DIII	27-9

Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan



F. Peran Strategis Badiklat Hukum dan HAM Kepri

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 70 menyatakan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Pengembangan kompetensi dimaksud dapat berupa Pendidikan dan Pelatihan, seminar, kursus, penataran Bimbingan Teknis (Bimtek) dan praktik kerja di instansi lain serta pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama satu tahun.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPSDM Hukum dan HAM dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM, ditugaskan melakukan pengembangan SDM bagi Aparatur Hukum dan HAM.

Dengan menyadari amanahnya untuk menjadi leading sector di bidang pengembangan sumber daya manusia Hukum dan HAM di wilayah, maka Badiklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau dituntut untuk dapat memenuhi kompetensi berbagai kebutuhan unit kerja pengembangan melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM. Selain hal tersebut, Badiklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau harus mampu mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM. Hal ini merupakan tantangan bagi Badiklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas agar lebih berkualitas, cerdas, terampil dan bernurani melalui pengembangan kompetensi.

Dan dalam upaya mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM, Badiklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau dibawah Arahan BPSDM Hukum dan HAM mentransformasi organisasi dari penyelenggara program pengembangan SDM menjadi KemKumHAM Corporate University. Dalam konteks kelembagaan Corporate University tersebut, Badiklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau sesuai dengan arahan BPSDM Hukum dan HAM berupaya melaksanakan programnya dengan berpedoman pada pendekatan competency-based human resources management system (CBHRM), serta dengan mengacu kepada visi, misi dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM.

G. Sitematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Kepri Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan umum pada organisasi dengan penekanan pada aspek peran strategis Badiklat Hukum dan HAM, serta strategis untuk organisasi

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi uraian ringkasan/ikhtisar rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, sasaran kinerja pegawai, perjanjian kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini bersisi uraian capaian kinerja pada setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, serta perbandingan capaian kinerja. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2021 terkait dengan tugas pokok dan tugas strategis lainnya.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja tahun 2021 yang dirangkum kedalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Dalam melaksanakan tugas dan pembangunan di bidang hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai visi, misi, dan tujuan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Tahun 2020-2024 diharapkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang semakin baik serta profesional, aparatur negara di pusat dan daerah semakin mampu mendukung pembangunan nasional seperti yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017.

Sasaran strategis adalah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Kemenkumham menetapkan sasaran strategis tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Strategis kementerian Hukum dan HAM 2020-2024

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Pemangku Kepentingan	Sasaran Strategis 1 (SS1): Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
	Sasaran Strategis 2 (SS2): Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase institusi pusat yang melaksanakan program aksi HAM 2. Persentase institusi daerah yang melaksanakan program aksi HAM
	Sasaran Strategis 3 (SS3): Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Bisnis Proses Internal	Sasaran Strategis 4 (SS4): Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan Penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase mantan narapidan yang terampil dan bersertifikat 4. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap
	Sasaran Strategis 5 (SS5): Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Persentase menurunnya residivis 2. Persentase penegakkan hukum Keimigrasian yang maksimal
	Sasaran Strategis 6 (SS6): Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing masing wilayah 2. Persentase permohonan bantuan hukum yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pembelajara dan Pertumbuhan	Sasaran Strategis 7 (SS7): Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8): Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Korupsi
	Sasaran Strategis 9 (SS9): Meningkatkan efektivitas organisasi	Indeks efektivitas organisasi
	Sasaran Strategis 10 (SS10): Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Anggaran (Keuangan)	Sasaran Strategis 11 (SS11): Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien	1. Nilai SMART 2. Nilai IKPA

Seperti yang tertuang dalam tabel diatas, salah satu sasaran Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 adalah Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM (Sasaran Strategis 7, perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan). Dan sebagai implementasi dari bentuk pelaksanaan amanah tugas dan fungsi, serta dukungan bagi upaya pencapaian sasaran strategis tersebut, maka BPSDM Hukum dan HAM menetapkan tujuan strategisnya yaitu Meningkatkan kinerja organisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui pengembangan SDM berbasis Corporate University.

Arah kebijakan pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Rencana strategis (Renstra) Balai Diklat Hukum dan HAM merupakan turunan dari Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024. Sasaran Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau sepanjang pelaksanaan rencana strategis 2020-2024 ini. Dan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Sasaran strategis disusun melalui pendekatan 4 perspektif Balanced Scorecard, yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan
2. Perspektif Proses Internal
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
4. Perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran

Sasaran strategis pada perspektif Pemangku Kepentingan mengacu kepada posisi seperti apa yang harus dicapai oleh organisasi di mata para pemangku kepentingannya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

Sasaran strategis pada perspektif Proses Internal akan mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai oleh organisasi dalam hal proses bisnis internalnya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

Sasaran strategis pada perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai dalam hal atribut, karakteristik, atau kinerja SDM dan kelembagaan organisasi dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

Sementara itu, sasaran strategis pada perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran akan mengacu kepada bagaimana seharusnya kinerja organisasi dalam hal keuangan atau disiplin anggaran.

Sasaran strategis Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau dalam empat perspektif tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Strategis BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024

Perspektif	Sasaran Strategis
Pemangku Kepentingan	Menjadi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi Administrasi utama yang dapat bekerjasama dalam pengembangan kompetensi SDM di bidang Hukum dan HAM dengan pemangku kepentingan
Proses Internal	1. Menyelenggarakan program pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi berbasis TI

Perspektif	Sasaran Strategis
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi yang berstandar global dan terakreditasi 3. Mengelola pelatihan yang melibatkan 3 Pilar Pelatihan (WI, Penyelenggara, dan Pengelola) 4. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir 5. Memiliki infrastruktur teknologi informasi untuk pendidikan dan pelatihan SDM yang berkualitas
Pembelajaran dan Pertumbuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki SDM fungsional dan penunjang yang berkompetensi tinggi dan terkreditasi 2. Membentuk organisasi yang optimal dan efektif dalam menjalankan fungsi dan peran 3. Menjalin kerjasama sin
Keuangan atau Disiplin Anggaran	Memanfaatkan anggaran yang optimal, tepat sasaran dan akuntabel

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan Hukum dan HAM Kepulauan Riau, adalah dokumen berisikan penugasan dari Kepala BPSDM Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator dan target.

Melalui Perjanjian Kinerja inilah kinerja Balai Pendidikan Hukum dan HAM Kepulauan Riau menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja ini diselaraskan dengan rencana kinerja tahunan 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Berikut dokumen Perjanjian Kinerja Badiklat Hukum dan HAM Kepri Tahun 2021.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Badiklat Hukum dan HAM Kepri Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	70%
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	85%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentasi hasil penilai kompetensi yang ditindak lanjuti oleh pengguna	80%
		2. Persentase Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM yang mendapatkan pengembangan kompetensi	90%
		3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	90%
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah	85%

Dipertengahan tahun 2021 BPSDM Hukum dan HAM merevisi perjanjian kinerja Badiklat Hukum dan HAM Kepri untuk indikator kinerja poin 1 yaitu persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan dan indikator kinerja program poin 1 yaitu Persentasi hasil penilai kompetensi yang ditindak lanjuti oleh pengguna. Hal ini dikarenakan Badiklat Hukum dan HAM Kepri belum memiliki tusi penilaian kompetensi. Saat ini yang memiliki tusi penilaian kompetensi hanya Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM.

Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Program kerja tahun 2021 lalu telah disusun beberapa rencana kerja berdasarkan sasaran program dan indikator dengan rician sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Capaian Output Badiklat Hukum dan HAM Kepri 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	1. Persentase Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang lulus Mengikuti Pelatihan di Wilayah	92%
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor	3
		2. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	47
		3. Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	60
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM	1. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1
		2. Jumlah laporan keuangan yang disusun	1
		3. Nilai SMART	95
		4. Jumlah laporan capaian kinerja	1
4	Layanan Perkantoran	1. Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%
		2. Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	80%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

A. Capaian Kinerja

Berikut output hasil capaian kinerja selama tahun 2021 sesuai dengan sasaran program, indikator kinerja serta target yang telah ditetapkan BPSDM Hukum dan HAM kepada Balai Diklat Hukum dan HAM Kepri:

Tabel 6. Hasil Kinerja Capaian Output Badiklat Hukum dan HAM Kepri Tahun 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	Persentase Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang lulus Mengikuti Pelatihan di Wilayah	92%	98,06%	107,17%	10.855.306.000	10.639.337.982	98,01%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor	3 unit	3	100%	2.042.600.000	2.010.232.000	98,42%
	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	49 unit	49	100%			
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	60 unit	60	100%			
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	1	100%	512.601.000	503.636.900	98,25%
	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1	1	100%			
	Nilai SMART	95	87,24	91,83%			
	Jumlah laporan capaian kinerja	1	1	100%			
Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	91,71%	96,66	3.352.952.000	3.232.485.642	96,41%
	Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	80%	100%	125%			

B. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis “Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM” dengan indikator Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya merupakan perjanjian kinerja dari Menteri Hukum dan HAM RI, BPSDM Hukum dan HAM beserta ketiga Balai Diklat Hukum dan HAM yang diamanatkan sebagai pengelola pengembangan kompetensi pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab dalam merealisasikan perjanjian kinerja tersebut.

Untuk realisasi janji kinerja tahun 2021 yang terdiri dari sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 7. Hasil Capaian Perjanjian Kinerja Badiklat Hukum dan HAM Kepri Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	85%	98,74%	116,16%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM yang mendapatkan pengembangan kompetensi	90%	100%	111,11%
		2. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	90%	98,96%	109,96%
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah	85%	93,70%	110,24%

Selama Tahun 2021 Badiklat Kepri telah menyelenggarakan 9 jenis pelatihan yang terdiri dari 95 angkatan dan 3.806 peserta pelatihan, pelatihan yang diselenggarakan sebagiannya ada yang menjadi output dari BPSDM Hukum dan HAM yaitu pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama yang berjumlah 10 angkatan dengan total peserta berjumlah 399 peserta, dan selebihnya merupakan output pelatihan dari Badiklat Hukum dan HAM Kepri sendiri.

Dalam mengukur keberhasilan pembelajaran dan kualitas penyelenggaraan Badiklat Hukum dan HAM kepri telah melakukan evaluasi pelatihan yang mencakup 4 tahapan evaluasi yang terdiri dari:

1. Evaluasi level 1: Reaksi (Evaluating Reaction)

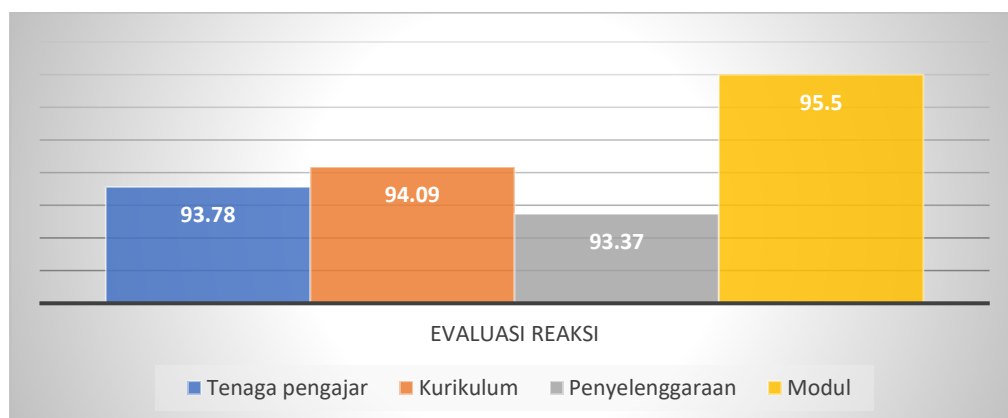
Program pelatihan dianggap efektif apabila proses pelatihan dapat memuaskan peserta diklat (customer satisfaction), sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih, yang akhirnya timbul reaksi yang menyenangkan dari pelatihan. Sebaliknya apabila peserta tidak puas terhadap proses pelatihan yang diikuti maka mereka tidak akan termotivasi untuk mengikuti pelatihan selanjutnya. Dengan demikian keberhasilan proses kegiatan pelatihan tidak terlepas dari minat, perhatian serta motivasi peserta dalam mengikuti jalannya pelatihan. Disinilah peran evaluasi reaksi menjadi sangat penting agar dapat menganalisa dan selanjutnya dapat memberikan bahan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus. Evaluasi reaksi peserta pada Pelatihan yang kami selenggarakan terdiri dari evaluasi tenaga pengajar, evaluasi kurikulum, evaluasi modul, dan evaluasi penyelenggaraan.

Untuk evaluasi reaksi yang diukur dari semua pelatihan yang terdiri dari 95 angkatan dengan total peserta berjumlah 3.806 peserta didapatkan hasil index kepuasan peserta sebesar 93,70 atau Sangat Memuaskan.

Berikut kriteria interpretasi skor index kepuasan peserta:

90,01-100	Sangat Memuaskan
80,01-90	Memuaskan
70,01-80	Baik
60,01-70	Kurang Baik
0-60	Tidak Baik

Grafik 2. Hasil Evaluasi Reaksi Pelatihan di Tahun 2021



2. Evaluasi level 2: Pembelajaran (Evaluating Learning)

Menurut Kirkpatrick ada 3 (tiga) hal yang dapat instruktur ajarkan dalam program pelatihan yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Peserta pelatihan dianggap telah belajar apabila pada dirinya telah ada perubahan sikap, peningkatan pengetahuan maupun perbaikan keterampilan, oleh karena itu untuk mengukur efektivitas program pelatihan maka ketiga aspek tersebut perlu untuk diukur. Tanpa adanya perubahan sikap, peningkatan pengetahuan serta perbaikan keterampilan pada peserta, maka program pelatihan dapat dikatakan gagal.

Dari total evaluasi pembelajaran didapatkan hasil sebanyak 3.732 peserta atau 98,06% peserta berhasil lulus pelatihan dan sisanya sebanyak 74 peserta atau 1,94% dinyatakan tidak lulus.

Grafik 3. Jumlah Kelulusan Peserta Pelatihan Tahun 2021



Dibandingkan dengan Tahun 2020 di tahun 2021 ini terdapat kenaikan output peserta pelatihan sebesar 2.775 peserta (369%) dan kenaikan jumlah jenis pelatihan, namun terjadi peningkatan jumlah peserta yang tidak lulus sebesar 74 orang, mayoritas peserta yang tidak lulus berasal dari pelatihan yang menggunakan metode e-learning. Jenis pengembangan kompetensi pada Tahun 2021 ini hanya berfokus pada Pelatihan saja, hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah peserta yang signifikan dan adanya Pelatihan Dasar CPNS, sehingga Badiklat Hukum dan HAM Kepri di Tahun 2021 memfokuskan pada jenis pengembangan kompetensi berupa pelatihan saja.

Tabel 8. Perbandingan Jumlah peserta, Tingkat Kelulusan, dan Jenis Pelatihan yang diselenggarakan ditahun 2020 dan 2021

Tahun	Jumlah Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Jumlah Jenis Pelatihan	Keterangan
2020	1.031	1.031	-	8	Jenis pengembangan kompetensi terdiri dari pelatihan, COP, dan webinar
2021	3.806	3.732	74	9	<ul style="list-style-type: none"> Jenis pengembangan kompetensi tahun 2021 hanya berupa pelatihan saja 399 peserta menjadi output BPSDM Hukum dan HAM

No	Nama Pelatihan	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Evaluasi Reaksi			
						Kurikulum	Penyelenggara	Tenaga Pengajar	Modul
1	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat dasar Metode PJJ	4	150	150	-	96,1	96,30	95,9	-
2	Pelatihan Pengamanan Tingkat lanjutan Metode PJJ	1	40	40	-	94,4	94,4	90,6	-
3	Pelatihan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas Metode PJJ	1	40	40	-	95,6	94,4	93	-
4	Pelatihan Pendetensian dan Deportasi Metode PJJ	1	40	40	-	95,8	96,6	97,2	-
5	Pelatihan Yankomas Metode PJJ	3	110	110	-	95,27	94,93	93,93	-
6	Latsar Metode Distance Learning dalam Keadaan Darurat	25	1009	1009	-	-	92,73	94,70	-
7	Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode E-Learning	25	1009	989	20	93,66	92,84	92,85	-
8	Pelatihan MTSL Metode E-Learning	25	1009	956	53	92,99	92,49	92,86	-
9	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama	10	399	398	1	96,28	96,33	95,24	95,50

Tabel 9. Daftar Pelatihan yang Diselenggarakan di Tahun 2021

3. Evaluasi level 3: Prilaku (Evaluating Behavior)

Evaluasi Perilaku (evaluating behaviour) ini berbeda dengan evaluasi terhadap sikap pada level 2 (dua) karena penilaian sikap pada evaluasi level 2 (dua) difokuskan pada perubahan sikap yang terjadi pada saat kegiatan diklat dilakukan. Penilaian tingkah laku difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah peserta kembali ketempat kerja, apakah juga diimplementasikan setelah peserta kembali ketempat kerja. Dengan kata lain bagaimana peserta dapat menerapkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan untuk diimplementasikan ditempat kerjanya, karena yang dinilai adalah perubahan perilaku setelah kembali ketempat kerja, maka evaluasi level 3 (tiga) ini dapat disebut sebagai evaluasi terhadap outcomes dari kegiatan pelatihan. Tujuan evaluasi perilaku (behaviour) bertujuan untuk mengukur efektivitas peserta pelatihan pada aspek perilaku (behaviour) dengan melihat perubahan perilaku setelah menerima materi dan bagaimana penerapannya, agar hasil yang diperoleh dari proses pemberian materi dapat diimplementasikan di unit kerja masing-masing. Diharapkan hasil pelatihan dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja instansi peserta bekerja.

4. Evaluasi level 4: Hasil (Evaluating Result)

Evaluasi hasil mengukur dampak hasil pelatihan dalam memperbaiki kinerja organisasi seperti penghematan biaya, peningkatan output, kepuasan pelanggan (customer satisfaction), dan kepuasan pegawai (employees satisfaction). Informasi berupa dampak penerapan hasil pelatihan terhadap kinerja peserta dan instansi, ukuran kinerja apakah yang mengalami perbaikan karena hasil pelatihan dan seberapa besar perubahan tersebut akan membantu penentuan ukuran kinerja organisasi.

Balai Diklat Hukum dan HAM telah melaksanakan evaluasi pasca pelatihan dengan survey 360 derajat (Peserta, Atasan Langsung, dan rekan kerja) sebagai implementasi evaluasi level 3, dan 4 yaitu evaluasi sikap prilaku dan

hasil. Evaluasi ini dilakukan paling cepat 6 bulan setelah pelatihan berlangsung, dengan demikian hanya beberapa pelatihan di Tahun 2021 yang dapat kami laksanakan mengingat ada beberapa pelatihan yang baru selesai di triwulan III. Berikut hasil evaluasinya:

Tabel 10. Hasil Evaluasi Pasca Diklat Indikator Peningkatan Skill, Knowledge dan Attitude di Tahun 2021

No.	Indikator	Jumlah Alumni Peserta Yang Mengalami Peningkatan (%)	Nilai Rata-Rata
Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar Angkatan III (22 Responden)			
1	Skill	99,31%	98,74%
2	Knowledge	98,61%	
3	Attitude	98,30%	
Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan Angkatan III (28 Responden)			
1	Skill	99,31%	98,74%
2	Knowledge	98,61%	
3	Attitude	98,30%	
Pelatihan Teknis Pendetensian Dan Deportasi Angkatan I (24 Responden)			
1	Skill	99,31%	98,74%
2	Knowledge	98,61%	
3	Attitude	98,30%	
Pelatihan Teknis Visa Kunjungan & Visa Tinggal Terbatas Angkatan I (21 Responden)			
1	Skill	99,31%	98,74%
2	Knowledge	98,61%	
3	Attitude	98,30%	
Nilai Rata-Rata			98,74%

Tabel 11. Hasil Evaluasi Pasca Diklat Indikator Penempatan Sesuai Kompetensinya di Tahun 2021

No	Pelatihan	Jumlah Alumni peserta yang menjadi responden	Allumni Peserta ditugaskan sesuai dengan kompetensinya	Alumni Peserta ditugaskan sesuai dengan kompetensinya
1	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar Angkatan III	22	22	100%
2	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan Angkatan II	28	28	100%
3	Pelatihan Teknis Pendetensian Dan Deportasi Angkatan I	24	23	95,83%
4	Pelatihan Teknis Visa Kunjungan & Visa Tinggal Terbatas Angkatan I	21	21	100%
Nilai Rata - rata				98,96%

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target tersebut antara lain:

- ✓ Pelatihan yang diselenggarakan merupakan pelatihan yang memang sangat dibutuhkan oleh pegawai dalam mendukung peningkatan kinerja individu dan organisasi;
- ✓ Dalam masa pandemi covid-19 yang masih terjadi ditahun 2021 ini, Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau dituntut tetap berkinerja secara adaptif dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi pegawai yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan berbasis e-learning dan pembelajaran jarak jauh;
- ✓ Para Tenaga Pelatihan dan Narasumber yang dihadirkan disetiap pelatihan berasal dari Widyaiswara, Akademisi, dan Praktisi yang kompeten dan ahli di bidangnya,
- ✓ Para panitia penyelenggara dinilai sangat baik dalam memberikan pelayanan pendampingan selama pelatihan berlangsung;

C. Kendala Atau Hambatan

Kendala yang dihadapi Balai Diklat Hukum dan HAM Kepri dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Selama pandemi covid-19 semua pelatihan di Balai Diklat Hukum dan HAM Kepri menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan E-Learning, metode ini sudah sesuai dengan arahan Kepala BPSDM Hukum dan HAM, hal tersebut dilakukan sebagai upaya penjangahan penularan wabah covid-19. Kendala yang paling sering ditemui oleh peserta, penyelenggara dan tenaga pengajar dalam model pelatihan PJJ yaitu masalah jaringan internet dan pemadaman listrik. Ditemukan beberapa peserta terputus jaringan internet saat melakukan pembelajaran daring menggunakan zoom meeting. Bahkan beberapa peserta sampai ada yang harus pindah ke beberapa lokasi karena ditempat tinggalnya terjadi pemadaman listrik;
2. Peserta yang mengikuti pelatihan sering kali masih melaksanakan tugas walaupun kami selaku penyelenggara pelatihan sudah melayangkan surat untuk membebaskan tugas para peserta dari rutinitas pekerjaan sehari-hari;
3. Beberapa mata pelatihan di Pelatihan Teknis yang memerlukan praktik langsung seperti latihan menembak tidak dapat dilakukan di pelatihan dengan metode PJJ, kami menyiasatinya dengan diganti menjadi simulasi peragaan oleh tenaga pengajar namun hal ini dirasa masih kurang efektif;
4. Untuk pelatihan metode e-learning ada beberapa peserta kami temukan kurang antusias sehingga tidak lulus dalam pelatihan.
5. Beberapa peserta pelatihan terpapar covid-19 saat melaksanakan kegiatan pelatihan.

D. Capaian Realisasi Anggaran Badiklat Hukum dan HAM Kepri Tahun 2021

Penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Penyerapan Anggaran Tahun 2021

Kode	Nama Kegiatan / Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5249	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah			
5249EAA	Layanan Perkantoran	3.352.952.000	3.229.525.132	96,32
5249EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	512.601.000	503.636.900	98,25
5249EAC	Layanan Umum	201.966.000	200.134.900	99,09
5249EAD	Layanan Sarana Internal	2.042.600.000	2.010.232.000	98,42
5249EAF	Layanan SDM	258.622.000	254.900.150	98,56
5249EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	159.480.000	147.894.500	92,74
5249EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	4.327.085.000	4.293.014.400	99,21
Jumlah		10.855.306.000	10.642.298.492	98,01

Ditahun 2021 Badiklat Hukum dan HAM Kepri melakukan 10 kali revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan kebijakan pelatihan dan anggaran dari BPSDM Hukum dan HAM. Semula pagu anggaran Badiklat Hukum dan HAM Kepri diawal tahun 2021 sebesar 25,347,107,000 setelah 10 kali revisi menjadi 10.855.306.000.

Tabel 13. Daftar Revisi Anggaran di Tahun 2021

Revisi ke-	Tanggal	Pagu Anggaran	Keterangan
10	22 Des 2021	10,855,306,000	Revisi POK dan penyesuaian Halaman III DIPA
9	30 Nov 2021	10,855,306,000	Revisi POK dan penyesuaian Halaman III DIPA
8	03 Nov 2021	10,855,306,000	Revisi POK dan penyesuaian Halaman III DIPA
7	25 Okt 2021	10,855,306,000	Revisi POK dan penyesuaian Halaman III DIPA
6	06 Okt 2021	10,855,306,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergeseran Anggaran dari KRO 5249.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal ke KRO 5249.EAA Layanan Perkantoran sebesar Rp. 95.740.000,-; 2. Pergeseran Anggaran dari KRO 5249.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal ke KRO 5249.EAC Layanan Umum sebesar Rp. 11.210.000,-; 3. Pergeseran Anggaran dari KRO 5249.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal ke KRO 5249.EAF Layanan SDM sebesar Rp. 27.430.000,-; 4. Pergeseran Anggaran dan Penambahan Output sebanyak 4 unit dalam 1 (satu) KRO 5249.EAD Layanan Sarana Internal.
5	05 Agu 2021	10,855,306,000	Adanya pengurangan anggaran sebanyak Rp.3.473.000.000, Berdasarkan nota dinas

Revisi ke-	Tanggal	Pagu Anggaran	Keterangan
			sekretaris BPSDM Hukum dan HAM No.SDM.1.PR.01.04-121 , tanggal 23 Juli 2021, terkait Refocussing Anggaran Tahap IV dan Pagu minus belanja gaji pegawai BPSDM Hukum dan HAM
4	27 Jul 2021	14,328,306,000	Adanya pengurangan anggaran sebanyak Rp.5.200.333.000, Berdasarkan nota dinas sekretaris BPSDM Hukum dan HAM No.SDM.1.PR.01.04-102 , tanggal 10 Juli 2021, terkait Refocussing Anggaran BPSDM Hukum dan HAM
3	16 Apr 2021	19,528,639,000	Revisi POK dan penyesuaian Halaman III DIPA
2	18 Mar 2021	19,528,639,000	Adanya pengurangan anggaran sebanyak Rp.2.500.000.000, Berdasarkan nota dinas sekretaris BPSDM Hukum dan HAM No.SDM.1.PR.01.04-06 , 20 Januari 2021, terkait Kebijakan Refocussing dan Refisi Anggaran BPSDM Hukum dan HAM
1	17 Feb 2021	22,028,639,000	Adanya pengurangan anggaran sebanyak Rp.3.318.468.000, Berdasarkan nota dinas sekretaris BPSDM Hukum dan HAM No.SDM.1PR.01.04-03, 18 Januari 2021, terkait penghematan belanja BPSDM Hukum dan HAM
Pagu Awal	13 Nov 2020	25,347,107,000	

2020				2021			
Nama Kegiatan / Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Nama Kegiatan / Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah				Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah			
Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	930.720.000	891.626.371	95,8	Layanan Perkantoran	3.352.952.000	3.229.525.132	96,32
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	794.022.000	736.964.300	92,81	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	512.601.000	503.636.900	98,25
Layanan Dukungan Manajemen Satker	628.987.000	574.431.825	91,33	Layanan Umum	201.966.000	200.134.900	99,09
Layanan Perkantoran	2.266.391.000	2.207.614.133	97,41	Layanan Sarana Internal	2.042.600.000	2.010.232.000	98,42
				Layanan SDM	258.622.000	254.900.150	98,56
				Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	159.480.000	147.894.500	92,74
				Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	4.327.085.000	4.293.014.400	99,21
Jumlah	4.620.120.000	4.410.636.629	95,47	Jumlah	10.855.306.000	10.642.298.492	98,01

Tabel 14. Perbandingan Penyerapan Anggaran Antara Tahun 2020 dan Tahun 2021

E. Analisa Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran Rumus untuk pengukuran efisiensi sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{\sum_{i=1}^n (PAK \times CK) - RAK}{\sum_{i=1}^n PAK \times CK} \times 100\%$$

Tabel 15. Capaian Kinerja Program Kegiatan Badiklat Hukum dan HAM Kepri Tahun 2021

KRO	RO	PAK	RAK	TVK	CK
Layanan Perkantoran (Layanan)	Layanan Perkantoran Balai Diklat Hukum dan HAM (Layanan)	3.352.952.000	3.232.485.642	1	1
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (Layanan)	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Balai Diklat Hukum dan HAM (Layanan)	449.401.000	447.910.400	1	1,1664
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (Layanan)	Manajemen Keuangan Internal Balai Diklat Hukum dan HAM (Layanan)	63.200.000	55.726.500	1	1,0845
Layanan Umum (Layanan)	Manajemen BMN Balai Diklat Hukum dan HAM (Layanan)	201.966.000	200.134.900	1	1,0837
Layanan Sarana Internal (unit)	Layanan Sarana Internal Balai Diklat Hukum dan HAM (unit)	2.042.600.000	2.010.232.000	112	112
Layanan SDM (orang)	Manajemen Kepegawaian Balai Diklat Hukum dan HAM (orang)	258.622.000	254.900.150	16	16,1663
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (Laporan)	Monitoring dan Evaluasi Internal Balai Diklat Hukum dan HAM (Laporan)	159.480.000	147.894.500	1	1,3326
Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal (Orang)	Layanan Pengembangan Kompetensi Aparatur di Wilayah (Orang)	4.327.085.000	4.293.014.400	3407	3407

Perhitungan :

$$Efisiensi = \frac{\sum_{i=1}^n (PAK \times CK) - RAK}{\sum_{i=1}^n PAK \times CK} \times 100\%$$

$$Efisiensi = \left(\frac{((PAK1 \times CK1) - RAK1) + ((PAK2 \times CK1) - RAK2) + ((PAK2 \times CK1) - RAK2) + ((PAK3 \times CK3) - RAK3) + ((PAK4 \times CK4) - RAK4) + ((PAK5 \times CK5) - RAK5) + ((PAK6 \times CK6) - RAK6)}{(PAK1 \times CK1) + (PAK2 \times CK1) + (PAK3 \times CK3) + (PAK4 \times CK4) + (PAK5 \times CK5) + (PAK6 \times CK6)} \right) \times 100\%$$

EFISIENSI =

$$((3.352.952.000 \times 1) - 3.232.485.642) + ((449.401.000 \times 1) - 447.910.400) + ((63.200.000 \times 1) - 55.726.500) + ((201.966.000 \times 1) - 200.134.900) + ((2.042.600.000 \times 112) - 2.010.232.000) + ((258.622.000 \times 16) - 254.900.150) + ((159.480.000 \times 1) - 147.894.500) + ((4.327.085.000 \times 3407) - 4.293.014.400)$$

X 100%

$$(3.352.952.000 \times 1) + (449.401.000 \times 1,1664) + (63.200.000 \times 1,0845) + (201.966.000 \times 1,0837) + (2.042.600.000 \times 112) + (258.622.000 \times 16,1663) + (159.480.000 \times 1,3326) + (4.327.085.000 \times 3407)$$

EFISIENSI =

Rp14.968.872.447.508,00	X 100% = 0,999276 X 100% = 99%
Rp14.979.707.823.167,20	

Dari hasil penghitungan di atas, diperoleh nilai efisiensi kinerja anggaran sebesar 99%. Meskipun dari hasil penghitungan tersebut, nilai efisiensi yang diperoleh sebesar 99%, tetapi secara sistem pada aplikasi SMART DJA nilai efisiensi yang ditampilkan hanya sampai 20% untuk nilai maksimal dan -20% untuk nilai minimal.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk realisasi janji Kinerja Badiklat Hukum dan HAM Kepri Tahun 2021 yang terdiri dari sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan semuanya telah melebihi target yang ditetapkan seperti:
 - a. Indikator Kinerja Utama Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya ditargetkan 85% (diukur dari evaluasi pasca pelatihan) realisasinya mencapai 98,74%;
 - b. Indikator Kinerja program Persentase SDM dibidang Hukum dan HAM yang mendapatkan pengembangan kompetensi ditargetkan 90% (dari yang direncanakan) realisasinya mencapai 100%.
 - c. Indikator Kinerja Program Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya ditargetkan 90% realisasinya mencapai 98,96%
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Penyelenggaraan pelatihan di Wilayah (diukur dari hasil evaluasi reaksi peserta) ditargetkan 85% realisasinya mencapai 93,70%
2. Capain Output Kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Kepri berdasarkan 4 sasaran program dan 10 Indikator Kinerja sebagian besar telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bahkan ada beberapa indikator yang melebihi target seperti:
 - a. inidikator Persentase Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang lulus Mengikuti Pelatihan di Wilayah ditargetkan 92% realisasinya mencapai 98,06%
 - b. indikator Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan ditargetkan 80% realisasinya mencapai 100%.

Ada 2 indikator yang tidak memenuhi target diantaranya:

- a. indikator Nilai SMART ditargetkan 95 namun realisasinya hanya 87,24. Adapun hal ini bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya:
 - 1) Tingginya deviasi Halaman III DIPA
 - 2) Keterlambatan dalam penyerapan anggaran
 - 3) Terdapat beberapa kesalahan SPM
 - b. Indikator Realisasi pembayaran gaji dan Tunjangan ditargetkan sebesar 95% namun realisasinya hanya mampu mencapai 91,71%. Hal ini dikarenakan adanya pegawai Balai Diklat Hukum dan HAM yang pindah tugas Ke BPSDM Hukum dan HAM.
3. Jumlah peserta pelatihan di Balai Diklat Hukum dan HAM Kepri ditahun 2021 berjumlah 3.806 peserta mengalami peningkatan sebesar 369% dari tahun 2020 yang hanya sebanyak 1.031 peserta. Terdapat 399 peserta diantaranya menjadi output BPSDM Hukum dan HAM.
4. Secara umum kinerja keuangan TA 2021 sudah baik. Hal ini terlihat dari capaian penyerapan anggaran sebesar 98,01% atau sebesar Rp 10.855.306.000 dari total pagu 10.642.298.492, penyerapan tahun ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang hanya mampu mencapai 95,47%. Nilai efisiensi kinerja anggaran Tahun 2021 sebesar 99%.

B. Rencana Tindak Lanjut

Adapun rencana tindak lanjut terhadap hambatan/permasalahan yang ada, yaitu:

1. perlunya penegasan kembali baik itu kepada peserta, atasan/pimpinan pada unit/satuan kerja bahwa pelatihan yang dilakukan secara distance learning/ pembelajaran jarak jauh memiliki aktifitas yang sama halnya dengan pelatihan secara klasikal, dimana peserta dituntut untuk aktif dalam setiap proses pembelajaran mulai dari tatap muka secara virtual, penugasan, hingga evaluasi pembelajaran sehingga tetap dibutuhkan perhatian dan konsentrasi dalam mengikuti pelatihan tersebut.
2. Perlunya peran aktif dari atasan/pimpinan pada unit/satuan kerja dalam mengawasi dan memberikan dukungan fasilitas kepada pegawainya yang sedang mengikuti pelatihan agar dalam pelaksanaan pelatihan pegawai dapat menyelesaikan dengan hasil yang terbaik.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinto Gunawan Sitorus
Jabatan : Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanjungpinang, 05 Maret 2021

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM
Kepulauan Riau



Rinto Gunawan Sitorus
NIP. 198208292008011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kerjanya	70% 85%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang dilanjutkan oleh pengguna 2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi 3. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	80% 90% 90%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah	85%

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 25.347.107.000,-
Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Rp. 25.347.107.000,-

Tanjungpinang, 05 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau



Husni Thamrin
NIP. 196109011985031019

Pihak Pertama,
Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau



Rinto Gunawan Sitorus
NIP. 198208292008011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinto Gunawan Sitorus
Jabatan : Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Husni Thamrin
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 05 Maret 2021

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau



Husni Thamrin
NIP. 196109011985031019

Pihak Pertama,
Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau



Rinto Gunawan Sitorus
NIP. 198208292008011001